
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14565

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14565

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

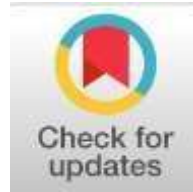
How to submit to this journal ([link](#))

Academia Open

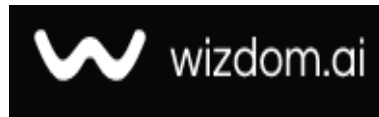
Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14565

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Collaborative Rehabilitation Strategies Restore Regional Business Stability Post Extreme Inundation: Strategi Rehabilitasi Kolaboratif Mengembalikan Stabilitas Bisnis Regional Pasca Bencana Ekstrem

Erliyanti Erliyanti, erliyantisauhan@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

Yurmaini Yurmaini, yurmainiyus86@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

Rangga Salam, salamrangga14@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

Budi Darma, Budialliance911@gmail.com (*)

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background Floods frequently cause widespread socio-economic disruption, leaving micro, small, and medium enterprises particularly vulnerable to operational losses. **Specific Background** In late November 2025, severe water hazards paralyzed the Kuala Simpang Market in Aceh Tamiang, destroying critical commercial assets, halting supply chains, and drastically reducing merchant revenues. **Knowledge Gap** Previous literature predominantly addresses infrastructural mitigation, leaving a significant scarcity of specific research detailing the economic healing struggles of localized vendor communities in this particular province. **Aims** This qualitative case study investigates the direct financial consequences of the hazard on market participants and analyzes the concrete recovery frameworks implemented by the local authorities. **Results** Field observations and in-depth interviews reveal that despite substantial inventory and capital losses, merchants demonstrated notable adaptability, which was actively supported by the comprehensive "Klinik UMKM Bangkit" initiative. This program successfully delivered targeted needs assessments, continuous enterprise mentoring, and crucial financial and equipment assistance. **Novelty** This research highlights that sustainable disaster recovery requires holistic commercial capacity building and strong social capital rather than merely providing temporary financial relief. **Implications** Formulating robust disaster-resilient local economies necessitates continuous, multi-stakeholder cooperation among government bodies, academic institutions, and the private sector to ensure long-term market continuity against future climate threats.

Highlights

- ♦ Severe water hazards structurally devastated commercial markets, eradicating physical inventory and drastically reducing the incomes of local vendors.
- ♦ The targeted "Klinik UMKM Bangkit" initiative successfully deployed needs assessments, mentoring, and capital assistance to accelerate vendor healing.
- ♦ Establishing sustainable economic longevity requires continuous strategic cooperation between government authorities, academic entities, and the private sector.

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14565

Keywords Economic Continuity; Enterprise Mentoring; Capital Assistance; Vendor Adaptability; Multi Stakeholder Cooperation

Published date: 2026-06-15

Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman, banjir juga berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan tingkat kemiskinan (Tambunan, 2019). Oleh karena itu, ketika terjadi bencana alam, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling rentan mengalami kerugian ekonomi.

Menurut Rose (2004), dampak ekonomi akibat bencana tidak hanya ditunjukkan oleh kerusakan fisik aset produksi, tetapi juga terganggunya rantai distribusi, menurunnya produktivitas usaha, berkurangnya permintaan pasar, serta terhambatnya akses terhadap sumber pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Karena itulah, memulihkan ekonomi setelah musibah bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kerja nyata dan kolaborasi yang solid dari semua pihak—mulai dari pemerintah, warga, pelaku usaha swasta, hingga institusi pendidikan.

Kondisi ini sangat tergambar jelas di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengingat posisinya yang berada di dataran rendah dan dilintasi banyak sungai, daerah ini memang langganan banjir tiap kali curah hujan sedang tinggi-tingginya. Situasi terburuknya pecah di penghujung November 2025. Saat itu, air bah dalam skala besar kembali menelan kawasan ini, membuat segala aktivitas warga seolah berhenti bernapas. Mulai dari fasilitas umum yang berantakan, terputusnya pelayanan masyarakat, sampai perputaran uang yang praktis lumpuh tak bergerak. Tentu saja, kepahitan ini tidak cuma dirasakan oleh warga di rumah-rumah mereka. Para penggerak usaha mikro dan kecil—yang notabene adalah urat nadi ekonomi daerah justru menjadi pihak yang paling remuk redam. Buat mereka, terjangan banjir kala itu benar-benar menjadi pukulan telak yang menguras tenaga dan harapan. Kios dan tempat usaha mereka rusak, stok barang dagangan hancur atau hanyut, dan pasokan bahan baku terputus total. Belum lagi, kondisi ekonomi warga yang sedang sulit membuat daya beli ikut anjlok, sehingga perjalanan untuk bangkit menjadi jauh lebih berat.

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Briguglio et al. (2009) yang menjelaskan bahwa kelompok usaha kecil merupakan sektor yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi karena memiliki keterbatasan sumber daya, akses modal, dan kapasitas adaptasi yang relatif rendah dibandingkan usaha berskala besar.

Pasar Kuala Simpang, yang selama ini menjadi jantung pergerakan ekonomi di Aceh Tamiang, tak luput dari kelumpuhan. Roda jual-beli di sana sempat mati suri karena tingginya genangan air dan rusaknya berbagai fasilitas penunjang pasar. Imbasnya sangat menyayat hati; banyak pelaku UMKM yang omzetnya terjun bebas, bahkan tak sedikit yang harus merelakan satu-satunya sumber "periuk nasi" mereka hilang begitu saja. Rentetan kejadian ini seolah menjadi bukti nyata bahwa nasib para pedagang kecil ini sangatlah menentukan: secepat apa mereka bisa kembali berdiri, secepat itu pula napas ekonomi daerah ini akan pulih dari trauma bencana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi pascabencana sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah melalui program rehabilitasi ekonomi, bantuan modal usaha, pendampingan bisnis, serta penguatan kapasitas kewirausahaan masyarakat (UNDRR, 2015). Temuan dari Hamidah dan Dwiningtias (2023) sebenarnya sudah mengonfirmasi bahwa program pembinaan dan pemberdayaan sangat ampuh dalam membuat pelaku UMKM lebih tangguh dan mudah beradaptasi di tengah krisis pascabencana. Selain itu, kecepatan pemulihan ekonomi warga juga sangat bergantung pada dukungan lembaga terkait serta eratnya kerja sama lintas sektor.

Sayangnya, kalau kita menengok riset-riset yang sudah ada, kebanyakan masih lebih sibuk menyoroti soal mitigasi atau sekadar menghitung kerugian infrastruktur fisik. Kajian yang secara khusus memotret perjuangan pemulihan ekonomi para pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Tamiang setelah dihantam banjir masih sangat minim. Padahal, masyarakat Aceh Tamiang itu punya denyut sosial dan ekonomi yang khas. Keunikan inilah yang pastinya sangat menentukan apakah program pemulihan dari pemerintah bisa benar-benar berdampak dan tepat sasaran.

Berangkat dari celah realitas tersebut, penelitian ini hadir dengan tujuan yang jelas. Kita ingin membedah secara langsung seberapa dalam dampak banjir ini melumpuhkan nadi ekonomi UMKM di Aceh Tamiang, sekaligus mengkaji langkah-langkah nyata apa saja yang telah diupayakan pemerintah untuk merangkul dan membangunkan kembali usaha warga dari keterpurukan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam perumusan kebijakan pemulihan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi daerah terdampak bencana.

Landasan Teori

A. Teori Resiliensi Ekonomi

Konsep resiliensi ekonomi (economic resilience) berkembang sebagai pendekatan untuk memahami kemampuan individu, komunitas, maupun wilayah dalam menghadapi dan pulih dari gangguan ekonomi akibat krisis atau bencana. Berbicara soal ketangguhan atau resiliensi ekonomi, Rose (2004) pernah menggambarannya sebagai daya lenting sebuah sistem yakni seberapa mampu kita menekan kerugian dan seberapa cepat kita bisa bangkit lagi setelah dihantam krisis. Kalau konteksnya adalah musibah bencana alam, tangguh itu bukan sekadar soal bisa bertahan hidup. Lebih dari itu, ini tentang keluwesan untuk beradaptasi, bahkan bertransformasi, agar roda ekonomi bisa kembali berputar dengan baik.

Di sisi lain, Briguglio dan kawan-kawan (2009) mengingatkan bahwa daya lenting ini tidak muncul dengan sendirinya. Ada banyak fondasi yang menopangnya, mulai dari seberapa baik kinerja institusi terkait, seberapa mudah akses ke sumber modal, kualitas sumber daya manusianya, hingga seberapa jitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sederhananya, makin kuat pilar-pilar ini, makin besar pula harapan sebuah komunitas untuk segera lepas dari jerat krisis pascabencana.

Nah, kalau kita tarik ke dunia UMKM, ketangguhan ini bisa kita lihat langsung dari keseharian para pelaku usahanya. Apakah mereka mampu memutar otak untuk mempertahankan usahanya? Apakah mereka sigap merombak strategi bisnisnya? Dan apakah mereka jeli memanfaatkan berbagai dukungan yang ada demi mempercepat pemulihan? Karena itulah, program pemulihan pascabencana sebetulnya tidak boleh berhenti pada sekadar bagi-bagi bantuan fisik atau modal saja, tetapi harus benar-benar menyentuh aspek yang lebih krusial: memperkuat mental dan keahlian adaptasi para pelaku usaha itu sendiri.

B. Teori Pemulihan Pascabencana

Pemulihan pascabencana merupakan proses mengembalikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setelah mengalami gangguan akibat bencana. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR, 2015), pemulihan pascabencana mencakup berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan membangun kembali kehidupan masyarakat secara lebih baik (build back better).

Pemulihan ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam proses rehabilitasi karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Gunasekera et al. (2018) menyatakan bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi pascabencana dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan dukungan pembiayaan, memperbaiki infrastruktur ekonomi, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, pemulihan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan langsung, tetapi juga melalui program pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk kembali produktif. Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan karena mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

C. Teori Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan proses peningkatan kemampuan pelaku usaha melalui penguatan akses terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar. Menurut Tambunan (2019), UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di masa-masa sulit setelah bencana mereda, merangkul dan memberdayakan UMKM sebenarnya adalah kunci utama untuk menghidupkan kembali urat nadi ekonomi warga. Langkah-langkah nyata seperti suntikan modal segar, pelatihan keterampilan bisnis, pendampingan yang intens, hingga bantuan untuk membuka jalan ke pasar yang lebih luas, ibarat "napas buatan" yang memberi pelaku usaha tenaga untuk kembali berdiri tegak.

Namun, ada satu hal menarik yang digarisbawahi oleh Aldrich (2012). Menurutnya, semua bantuan teknis dan finansial itu baru akan benar-benar sukses jika dibarengi dengan kuatnya modal sosial di tengah masyarakat. Modal sosial ini tentu bukan berupa uang, melainkan seberapa erat ikatan pertemanan, seberapa besar rasa saling percaya, dan seberapa tulus semangat gotong royong antarwarga. Sederhananya, tanpa adanya rasa kebersamaan dan bahu-membahu, jalan menuju pemulihan ekonomi pascabencana akan terasa jauh lebih berat.

Ikatan batin dan kepedulian yang kuat di tengah warga sejatinya adalah pelumas terbaik untuk mempercepat kebangkitan. Ketika orang-orang saling percaya, berkolaborasi, dan mau bergotong royong, beban seberat apa pun setelah bencana pasti terasa lebih ringan untuk dipikul bersama.

Berpijak pada gagasan-gagasan itulah, penelitian ini meramu tiga sudut pandang utama: ketangguhan ekonomi, proses penyembuhan pascabencana, dan langkah merangkul UMKM. Ketiga elemen ini ibarat "kacamata" yang kami pakai untuk melihat secara jernih seberapa dalam luka yang ditinggalkan banjir pada napas usaha para pedagang. Di saat yang sama, kerangka berpikir ini juga membantu kami menakar dengan adil apakah program penyelamatan ekonomi yang digulirkan pemerintah di Aceh Tamiang sudah benar-benar tepat sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak banjir terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun kemanusiaan.

Penelitian ini mengambil latar di Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Mengapa memilih tempat ini? Karena pasar ini ibarat jantung penggerak ekonomi warga yang sayangnya sempat lumpuh total akibat hantaman banjir besar pada penghujung tahun 2025 lalu. Dalam menggali cerita di lapangan, kami tidak hanya mengobrol dengan para pelaku UMKM yang usahanya terdampak langsung, tetapi juga merangkul pengelola pasar dan perwakilan pemerintah daerah yang turun tangan mengurus pemulihan.

Agar bisa memotret realitas ini secara transparan dan apa adanya, kami tidak mau hanya meraba-raba dari jauh; kami harus menggali kebenarannya langsung dari sumber pertama. Kami sengaja terjun ke lokasi, menyaksikan sendiri sisa-sisa amukan banjir sekaligus melihat bagaimana denyut kehidupan pasar mencoba bertahan. Kami juga meluangkan waktu untuk duduk bersama warga, mendengarkan langsung keluh kesah dan perjuangan mereka lewat obrolan-obrolan yang mendalam. Tentu saja, agar cerita dari lapangan ini tidak berdiri sendiri, kami mengawinkannya dengan berbagai rekam jejak tertulis mulai dari dokumen resmi pemerintah, catatan sejarah kebencanaan, liputan media, hingga literatur akademis sehingga seluruh kepingan informasinya menjadi utuh dan solid. Tentu saja, agar hasil riset ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, kami tidak menelan mentah-mentah semua informasi yang masuk. Kami selalu melakukan cek silang atau triangulasi, yakni membandingkan cerita dari satu narasumber dengan narasumber lain, lalu mencocokkannya lagi dengan dokumen yang ada. Setelah semua bahan terkumpul, data tersebut kami rajut menggunakan pendekatan analitis dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Prosesnya sangat dinamis; mulai dari memilah informasi yang paling krusial, memetakan polanya, hingga menarik kesimpulan dan langkah ini terus kami lakukan secara berkesinambungan sejak hari pertama turun ke lapangan sampai riset ini benar-benar rampung.

Hasil dan Pembahasan

A. Dampak Banjir terhadap Kondisi Ekonomi Pelaku UMKM di Aceh Tamiang

Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang beroperasi di kawasan Pasar Kuala Simpang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar pelaku usaha mengalami kerusakan tempat usaha, kehilangan stok barang dagangan, kerusakan peralatan produksi, serta terhambatnya distribusi barang akibat kerusakan infrastruktur jalan dan transportasi.

Imbas dari situasi ini benar-benar menghantam kantong para pedagang; omzet mereka anjlok secara drastis. Saking sulitnya keadaan, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menutup warung dan menghentikan usahanya sementara waktu. Modal mereka sudah habis terkuras, sementara pasar di sekitar juga masih mati suri dan sepi pembeli.

Apa yang kami saksikan di lapangan ini sebenarnya sangat membenarkan pandangan Rose (2004). Ia pernah menggarisbawahi bahwa bencana alam memang sanggup mengacaukan seluruh urat nadi ekonomi. Bencana tidak hanya mematikan proses produksi, tetapi juga mencekik jalur distribusi dan melemahkan daya beli warga, yang pada akhirnya membuat roda perekonomian masyarakat berhenti berputar.

Namun, kepedihan yang menyelimuti mereka sebenarnya jauh melampaui sekadar hitung-hitungan rupiah atau seberapa banyak barang yang hanyut. Ada beban mental yang begitu menghimpit dada. Bayangkan saja, jerih payah membangun usaha bertahun-tahun musnah dalam kedipan mata, dibarengi rasa waswas memikirkan bagaimana caranya menyambung hidup esok hari. Guncangan batin ini benar-benar menguras energi para pedagang kecil. Realitas di lapangan ini pada akhirnya membuka mata kita pada satu hal penting: daya rusak sebuah bencana itu tidak cuma merampas harta benda secara fisik, tapi juga pelan-pelan menggerogoti ketangguhan mental dan daya juang para pelaku usaha untuk meracik strategi agar bisnisnya tetap bisa bernapas.

B. Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Klinik UMKM Bangkit

Sebagai bentuk respons terhadap dampak bencana, pemerintah melalui Kementerian UMKM dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang meluncurkan program Klinik UMKM Bangkit. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha yang terdampak banjir melalui berbagai bentuk intervensi, mulai dari asesmen kebutuhan usaha, pendampingan bisnis, bantuan modal kerja, hingga penyediaan sarana produksi.

Dari apa yang kami temukan di lapangan, program "Klinik UMKM Bangkit" rupanya punya cara kerja yang sangat terarah lewat empat langkah utama. Bukannya bergerak serampangan, mereka mulai dengan memetakan dan mendata langsung siapa saja pelaku usaha yang paling terpukul. Setelah itu, mereka tidak membiarkan warga berjuang sendirian; ada pendampingan usaha yang diberikan secara intens, disusul dengan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Sebagai puncaknya, program ini juga membukakan jalan agar warga lebih mudah mendapatkan suntikan modal dan alat-alat produksi yang baru.

Kalau diamati lebih jauh, langkah pemerintah ini terasa jauh lebih utuh dan matang ketimbang sekadar bagi-bagi bantuan sosial biasa. Alih-alih cuma memberi "obat pereda nyeri" berupa bantuan sesaat, program ini benar-benar dirancang untuk memastikan napas usaha warga bisa terus berlanjut dan perlahan kembali mandiri di masa depan.

Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan UMKM yang dikemukakan oleh Tambunan (2019), bahwa peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan dan akses permodalan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemulihan ekonomi pelaku usaha kecil.

C. Analisis Resiliensi Ekonomi Pelaku UMKM Pascabencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Aceh Tamiang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik dalam menghadapi kondisi pascabencana. Semangat pantang menyerah ini sangat terasa saat melihat mereka bersikeras untuk kembali berjualan, meski dengan fasilitas yang benar-benar seadanya. Banyak pedagang yang tak ragu

menggelar kembali lapak dagangannya di bawah tenda-tenda darurat bantuan pemerintah, sekadar agar roda usaha tidak mati sepenuhnya dan dapur tetap mengepul.

Kalau kita pinjam kacamata teori resiliensi ekonomi, apa yang dilakukan para pedagang ini adalah bukti nyata dari daya lenting masyarakat. Mereka membuktikan bahwa mereka tidak hanya pasrah, tetapi mampu beradaptasi dan melawan balik tekanan krisis pascabencana. Tentu saja, kebangkitan ini bisa berlari jauh lebih cepat karena mereka tidak sendirian; ada kolaborasi dan uluran tangan yang kuat dari pemerintah, kampus-kampus, komunitas warga, hingga pihak swasta yang bahu-membahu menopang ekonomi lokal.

Meski begitu, bukan berarti jalan ke depan sudah mulus. PR besarnya masih menumpuk: modal usaha yang masih kembang-kempis, dompet warga sekitar yang masih tipis sehingga daya beli belum normal, hingga bayang-bayang kecemasan kalau-kalau bencana serupa datang lagi suatu hari nanti. Melihat realitas ini, ke depannya kita butuh kebijakan yang tak cuma sekadar "mengobati", tapi benar-benar membangun tameng ekonomi yang kuat. Caranya tidak lain dengan terus membekali dan mengasah kemampuan UMKM, membuka akses pinjaman modal yang lebih ramah dan merangkul semua kalangan, serta memastikan warga punya kesiapsiagaan yang matang saat alam kembali tidak bersahabat.

D. Peran Pemerintah dan Kolaborasi Multipihak dalam Pemulihan UMKM

Bicara soal seberapa sukses sebuah daerah bangkit dari sisa-sisa bencana, kita tentu tidak bisa tutup mata dari peran vital pemerintah. Merekalah nakhoda utamanya, pihak yang memegang kendali atas lahirnya kebijakan dan turunnya sumber daya. Dari pantauan kami di lapangan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kementerian UMKM benar-benar menghasilkan gebrakan yang nyata. Mereka tidak tinggal diam, melainkan langsung tancap gas mengeksekusi berbagai strategi untuk menghidupkan kembali denyut usaha warga. Lewat payung Program Klinik UMKM Bangkit, mereka turun langsung mendata siapa saja yang terdampak, membagikan peralatan usaha, membukakan keran modal, hingga menerjunkan pendamping khusus untuk mengawal para pelaku usaha.

Kalau kita bedah dari kacamata teori pemulihan pascabencana, apa yang mereka lakukan ini punya makna yang dalam. Ini bukan sekadar skema "memberi ikan lalu pergi", yang biasanya cuma jadi pereda kejut sesaat. Alih-alih, langkah ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membangun fondasi mental dan kapasitas usaha warga agar jauh lebih kokoh. Lewat pendampingan yang telaten, warga dibimbing untuk meracik ulang strategi bisnis yang pas dengan kondisi krisis, didedikasi soal cara mengatur napas keuangan, dan dibantu memperluas jejaring pasar agar usaha mereka bisa terus berumur panjang. Pastinya, roda pemulihan ini tidak berputar sendirian oleh tangan pemerintah; ada keringat dan kontribusi luar biasa dari rekan-rekan di kampus atau perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat yang ikut bahu-membahu merawat harapan para korban.

Keterlibatan akademisi dalam memberikan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pendampingan usaha menunjukkan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan persoalan publik.

E. Tantangan Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Meskipun berbagai program pemulihan telah dilaksanakan, proses pemulihan ekonomi UMKM di Aceh Tamiang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan terbesar yang paling bikin pusing para pelaku UMKM saat ini tentu saja adalah urusan modal. Bayangkan saja, banyak dari mereka yang kehilangan mesin, stok barang, atau alat kerja utamanya saat banjir menerjang. Di saat yang sama, mereka juga kebingungan mencari suntikan dana segar karena akses untuk meminjam ke bank atau lembaga keuangan resmi rasanya masih terlalu sulit dan berbelit. Ujung-ujungnya, niat untuk menggenjot kembali usahanya secara maksimal jadi tersendat.

Masalahnya ternyata tidak berhenti sampai di urusan modal. Sekalipun mereka berhasil membuka lapaknya kembali, laju pemulihan terasa sangat lambat karena pembelinya sepi. Daya beli warga sekitar memang sedang merosot tajam. Hal ini sangat bisa dimaklumi; dalam kondisi baru saja tertimpa musibah, wajar kalau masyarakat lebih menahan uangnya demi mengamankan kebutuhan pokok untuk menyambung hidup, ketimbang membelanjakannya untuk barang atau jasa yang bukan prioritas utama.

Akibatnya, permintaan pasar belum sepenuhnya pulih meskipun aktivitas perdagangan mulai berjalan kembali.

Ketiga, rendahnya kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki strategi mitigasi risiko maupun mekanisme perlindungan usaha yang memadai. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemungkinan terjadinya bencana serupa pada masa mendatang.

F. Implikasi Kebijakan bagi Penguatan Resiliensi UMKM

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat, tetapi juga penguatan kapasitas usaha dan mitigasi risiko bencana.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun sistem pembiayaan khusus bagi UMKM terdampak bencana melalui skema pembiayaan lunak, subsidi bunga, maupun dana bergulir. Selain itu, peningkatan literasi kebencanaan bagi

pelaku UMKM juga perlu dilakukan agar mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan kerugian akibat bencana.

Penguatan digitalisasi UMKM juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan resiliensi ekonomi. Pemanfaatan platform digital dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tatap muka yang rentan terganggu saat terjadi bencana. Dengan demikian, pembangunan ketahanan ekonomi UMKM harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik tempat usaha dan hilangnya aset produksi, tetapi juga menyebabkan terganggunya rantai distribusi, penurunan omzet usaha, serta melemahnya daya beli masyarakat.

Realitas pahit ini pada akhirnya menyadarkan kita pada satu hal: UMKM adalah kelompok yang paling rapuh dan mudah goyah ketika alam sedang tidak bersahabat. Beruntung, di tengah situasi yang serba sulit untuk bangkit, pemerintah hadir membawa angin segar lewat Program Klinik UMKM Bangkit. Bukannya sekadar datang membawa kardus bantuan lalu pulang begitu saja, mereka memilih untuk benar-benar membaur dan berkeringat di lapangan. Secara telaten, mereka mencari tahu siapa yang lukanya paling dalam akibat bencana ini, lalu merangkul para pedagang tersebut lewat pendampingan yang intim. Insting bisnis warga yang sempat redup coba dipantik lagi, bahkan kebuntuan soal suntikan dana dan mesin produksi pun ikut dicarikan jalan keluarnya. Terobosan ini jelas bukan sekadar "plester luka" yang sifatnya sementara. Ini adalah sebuah komitmen maraton untuk mencetak pelaku usaha yang bermental baja, luwes menghadapi perubahan zaman, dan memastikan napas bisnis mereka tidak putus di tengah jalan.

Namun, dari semua proses panjang yang terjadi di Aceh Tamiang, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik. Uang atau bantuan finansial saja ternyata tidak pernah cukup untuk menyembuhkan luka ekonomi pascabencana. Roda ekonomi ini baru benar-benar bisa berputar kembali berkat gotong royong yang luar biasa antara pemerintah, pihak kampus, sektor swasta, dan tentunya masyarakat itu sendiri.

Karena itu, agar kita tidak lagi gagap saat krisis serupa datang menyapa, ke depannya kita butuh kebijakan yang berpandangan jauh ke depan. Kapasitas UMKM harus terus diasah, pintu pinjaman modal harus dibuat lebih ramah dan merangkul semua kalangan, dan yang tak kalah penting, masyarakat harus dibekali pemahaman yang cukup tentang mitigasi bencana. Hanya dengan cara inilah, kita bisa membangun fondasi ekonomi lokal yang benar-benar tangguh dalam menghadapi ujian apa pun di masa depan.

References

1. Aldrich, D. P. (2012). *Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery*. Chicago: University of Chicago Press.
2. BNPB. (2024). *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: Concepts and measurements. *Oxford Development Studies*, 37(3), 229–247.
4. Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Cutter, S. L., Burton, C. G., & Emrich, C. T. (2010). Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 7(1), 1–22.
6. Fatoki, O. (2018). The impact of entrepreneurial resilience on the success of small and medium enterprises. *Sustainability*, 10(7), 2527–2538.
7. Folke, C. (2016). Resilience. *Ecology and Society*, 21(4), 44–53.
8. Gunasekera, R., Ishizawa, O., & Matsukawa, T. (2018). Developing an adaptive framework for post-disaster recovery. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 27, 501–510.
9. Hallegatte, S. (2014). *Economic resilience: Definition and measurement*. World Bank Policy Research Working Paper, 6852.
10. Hamidah, H., & Dwiningtias, A. (2023). Strategi pemulihan ekonomi UMKM pascabencana melalui penguatan kapasitas usaha. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(1), 45–58.
11. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Statistik UMKM Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM.
12. Manyena, S. B. (2016). The concept of resilience revisited. *Disasters*, 30(4), 434–450.
13. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
14. Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June

DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14565

- metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150.
15. Pelling, M. (2011). *Adaptation to Climate Change: From Resilience to Transformation*. London: Routledge.
 16. Putra, H., & Yuliana, E. (2022). Dampak bencana alam terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 112–126.
 17. Rose, A. (2004). Defining and measuring economic resilience to disasters. *Disaster Prevention and Management*, 13(4), 307–314.
 18. Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of natural disasters on small business recovery in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 341–360.
 19. Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
 20. Tierney, K. (2019). *Disasters: A Sociological Approach*. Cambridge: Polity Press.
 21. Twigg, J. (2015). *Disaster Risk Reduction*. London: Overseas Development Institute.
 22. UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
 23. Wisner, B., Gaillard, J. C., & Kelman, I. (2012). *Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction*. London: Routledge.
 24. World Bank. (2023). *Building Back Better: Post-Disaster Recovery and Reconstruction*. Washington DC: World Bank.
 25. Yamori, N. (2021). Disaster risk and SME recovery: Lessons from Asian countries. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(2), 145–159.